



18
2 **Hariadi**, Politik Ekonomi Pembaruan Kebijakan Kehutanan dan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan, "Forest For People" Inspirasi dan Gemanya, ISBN : 979-98665-0-2

FORESTS FOR PEOPLE

Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat



Politik Ekonomi Pembaruan Kebijakan Kehutanan dan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan

oleh Dr. Hariadi Kartodihardjo

Abstract

The tropical forests in Indonesia had been degraded and deforested in an alarming rate, although several efforts have been made to rehablited the resources. Perhaps, the implementation of the forest policies could not overcome the problems faced. This paper will discuss the weaknesses of the forest policies and will suggest a policy reform dealing with institutional and pilitical economy, intellectual role, and political perspectives. It seems that the institutional aspects and policy inovation have been put in a lower priority in the forest policy reform process. In fact, since thirty years, the problem in the forestry sector development have been shifted from technical into social and institutional economy. Hence, the foresters should change the logical framework from "the forest first" to "the forest second". Consequently, the high education on forestry has to be in line with the above paradigm and to be geared toward the national social-economic and political dimensions.

Key words: institutional economy, political economy, intelectual, policy innovation.

PENDAHULUAN

Situasi Indonesia pada umumnya dan khususnya kehutanan dan pendidikannya banyak diliputi masalah. Namun sebagaimana banyak dijumpai, masalah itu sendiri dapat bersifat subjektif, maupun bersifat objektif. Subjektif, karena setiap orang yang sedang melihat fakta yang sama, dapat menyatakan masalah kehutanan dari pandangan yang berbeda. Hal itu disebabkan setiap orang

mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan sistem nilai yang dikonstruksikan secara berbeda untuk menilai fakta yang sama, sehingga dengan fenomena yang sama dapat menyebut masalah yang berbeda-beda pula.

Objektifitas dalam merumuskan masalah dapat diperoleh apabila setiap orang berangkat dengan konsep yang sama. Misalnya dengan konsep ekonomi pasti akan dihasilkan masalah-masalah ekonomi, konsep institusi akan dihasilkan masalah-masalah institusi, konsep politik akan dihasilkan masalah politik, dan seterusnya.

Dengan kaca mata konsep ekonomi (manfaat langsung/*direct benefit*), secara nasional masalah kehutanan tidak terlihat. Itu disebabkan kontribusi pembangunan kehutanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) relatif sangat kecil. Selama periode 1977-1998 hanya sekitar 2,5% per tahun. Total PNBP tahun 2003 diperkirakan sebesar Rp. 67 triliun atau sekitar 20,4% dari total pendapatan negara. PNBP yang berasal dari sumber daya alam pada tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp. 49,5 triliun atau sekitar 73,9% dari total PNBP. Sumbangan tersebut berasal dari pendapatan dari sektor-sektor seperti minyak dan gas bumi (94,1%), pertambangan umum (2,8%), kehutanan (2,4%) dan lain-lain (0,6%). (Nota Keuangan RAPBN 2003). Situasi tersebut telah mewujudkan nuansa secara nasional bahwa:

“Pelestarian hutan dan bahkan sumber daya alam secara umum tidak pernah menjadi *platform* yang bisa terangkat secara politik. Kejadian-kejadian khusus kerusakan hutan yang jelas-jelas telah memusnahkan modal sosial dan ekonomi, seperti akibat banjir dan longsor yang semakin rutin kejadiannyapun hanya menjadi isu yang timbul tenggelam. Hal demikian terjadi salah satunya adalah adanya kekeliruan ukuran keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan (ekonomi) mengambil porsi hasil-hasil pemanfaatan komoditas yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam, namun tidak memperhitungkan kerusakan sumber daya alam (sebagai *stock resources*) sebagai ongkosnya”.

Sayangnya manfaat lingkungan dan ekologi, termasuk keanekaragaman hayati, belum dapat dikonversikan ke dalam perhitungan ekonomi. Ini adalah tantangan bagi para ahli terkait untuk dapat menyajikan secara sederhana dan mudah dimengerti untuk mengkonversikan nilai dan manfaat lingkungan dimaksud.

Dalam hal rusaknya sumber daya alam maka perjuangan secara politik untuk memberi harga atas rusaknya sumber daya alam haruslah diupayakan. Demikian pula apabila dunia kehutanan ingin “dianggap” dan menjadi masalah dalam percaturan ekonomi politik nasional. Membicarakan langkah-langkah jangka pendek atau hal-hal pragmatis untuk menyelesaikan masalah-masalah kehutanan menjadi tidak berarti, karena tatanan ekonomi politik nasional belum sejalan dengan arus pelestarian sumber daya hutan. Di samping itu, prakondisi agar kebijakan kehutanan dapat berjalan efektif juga masih belum tersedia. Prakondisi tersebut misalnya adanya kepastian hak atas sumber daya hutan dan kepastian kewenangan pelaksanaan pengelolaan hutan. Mewujudkan prakondisi seperti itu belum menjadi agenda utama dalam pengelolaan hutan nasional.

Tembok ekonomi politik yang demikian itu adalah suatu kenyataan. Merobohkan tembok yang demikian tidaklah mungkin dilakukan secara cepat apalagi harus dikejar dalam hitungan bulan. Jika disadari demikian kondisinya, maka persoalannya adalah bagaimana bisa dihasilkan inovasi pemikiran yang dapat melampaui batasan-batasan yang ada. Dan oleh karenanya diperlukan kerja sangat serius oleh segenap pihak untuk memahami secara utuh kondisi yang sebenarnya, meninggalkan sejauh-jauhnya perkiraan dan prasangka yang hanya menjadi belenggu alam pikiran dan rasa ketakutan dan kepanikan.

Ekonomi politik bukan hanya merasuki dunia kehutanan, melainkan juga dunia pendidikan (kehutanan). Pembaruan sistem pendidikan nasional melalui pembenahan perundang-undangannya kini terus menjadi perhatian masyarakat. Tingginya perdebatan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang lalu menunjukkan besarnya *gap* antara tatanan yang dikehendaki masyarakat untuk membenahi sistem pendidikan secara mendasar dengan kemauan politik eksekutif dan legislatif. Baik situasi kehutanan maupun pendidikannya sudah terbawa oleh belenggu pemikiran-pemikiran, di satu sisi sangat pragmatis dan di sisi yang lain menunjukkan kepanikan dalam menentukan arah kebijakan yang hendak dituju.

Tulisan ini mencoba menguraikan problem kehutanan dan pendidikan tinggi kehutanan dari sisi masalah inovasi pembaruan kebijakannya. Isinya lebih

mengupas terhambatnya kemunculan pemikiran kritis, pengaruh kekuasaan, dan berbagai kondisi yang berjalan selama ini, yang dipertimbangkan sebagai pokok masalah dalam pembaruan kebijakan yang belum banyak diurai sebelumnya.

KEBIJAKAN KEHUTANAN :

Merendahkan Resiko Rusaknya Hutan

Landasan kebijakan untuk menentukan hitam-putihnya pengelolaan hutan sebagian besar ditentukan dengan misi *private policy*. Salah satu cirinya adalah mengunggulkan cara-cara atau rancangan-rancangan untuk melaksanakan sesuatu (pendekatan teknokrat), baik terhadap pengelolaan hutan maupun terhadap pengolahan hasil hutan. Misalnya di tahun 70-an dan 80-an lahir dalam cetak biru bentuk HPH dan industri kayu lapis. Sedangkan dampak suatu kegiatan bagi kemanfaatan umum secara langsung, yang tolok ukurnya bersandar pada apa yang disebut sebagai *public policy*, jauh tertinggal.

Sampai kini bahkan kebijakan kehutanan yang bersandar erat pada konsep ekonomi dan institusi belum ada. Pembangunan kehutanan berjalan berdasarkan pendekatan *command and control*. Tatanan hak atas sumber daya hutan dan fungsi pelayanan lembaga publiknya masih mengacu pada awal tahun 80-an.

Kebijakan kehutanan sejauh ini berjalan tidak efektif untuk mampu mengendalikan perilaku dunia usaha dan masyarakat agar tidak merusak hutan, antara lain karena :

1. Sedikitnya rasa percaya atas maksud adanya kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan belum terlaksananya komunikasi antar pihak yang memungkinkan terwujudnya pengertian, alasan, dan cara-cara yang sama bagaimana tujuan kebijakan tersebut dicapai. Pertemuan multipihak selama ini baru berjalan untuk sekedar mengetahui kepentingan pihak